

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Mustamin ^{1*}, Muhammad Azhar Nur ²

¹ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

² Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Indonesia

* mustaminaburaerah@gmail.com

Abstract

Pemerintah desa melakukan tahapan kegiatan yang dikenal sebagai perencanaan pembangunan, yang melibatkan masyarakat dalam menentukan bagaimana sumber daya desa akan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Arah pembangunan desa harus mengikuti peraturan yang berlaku dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. membuat dokumen untuk perencanaan pembangunan harus memuat aspirasi masyarakat desa dan sesuai dengan kondisi desa. Permasalahan yang terjadi Di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai, orang masih belum memahami betapa pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes (APBDDes) karena mereka tidak memiliki cukup informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk menyusun dokumen-dokumen tersebut. Akibatnya, tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah untuk mendampingi dan melatih perangkat desa dan elemen masyarakat desa guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam proses penyusunan dokumen RKPDDes dan APBDDes serta mampu menyusun dokumen tersebut secara mandiri. dan berpartisipasi aktif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hasil dari penilaian kegiatan Pengabdian masyarakat ini menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan tentang mekanisme penyusunan dokumen RKPDDes dan APBDDes oleh 28 orang peserta pengabdian masyarakat yang terdiri dari perangkat desa, unsur masyarakat, karang taruna, BPD, pengurus BUMDes, dan PKK. penyelenggara dengan rata-rata tingkat pemahaman rata-rata 86,4 persen.

Keywords: *Kualitas Perencanaan; Pembangunan Desa; Penyusunan RKA*

Pendahuluan

Pada perencanaan dan penganggaran pembangunan, perlu adanya penguatan pemerintahan Desa dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa agar pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan tepat sasaran dan mengikuti peraturan yang berlaku (Abdillah et al, 2023; Hulu et al, 2018). Perangkat Desa Panaikang Kabupaten Sinjai menghadapi masalah dalam memahami pentingnya RKPDDes dan APBDDes tahunan (Erni et al, 2023; Rozandi et al, 2021; Nafidah et al, 2016). Sebab, masih diperlukannya pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas terutama dalam menyusun program dan kegiatan desa serta pengelolaan keuangan desa. Adapun untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dalam kegiatan ini yaitu keterbatasan

perangkat desa dan masyarakat desa mengenai hukum, fungsi dan peran perangkat desa dalam Menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan memerlukan bantuan penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes pada tahun berjalan (Alam et al, 2023; Novianty et al, 2021; Lestari et al, 2019).

Pelatihan dan pendampingan pembuatan RKPDes dan APBDes merupakan beberapa alternatif pengembangan sumber daya perangkat desa yang perlu dilakukan sebagai konsekuensi perubahan institusi pemerintahan desa dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang memuaskan (Mustamin et al, 2023; Syapsan et al, 2023). Aparat pemerintahan desa hendaknya memahami hakikat pemerintahan desa dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang peran, tanggung jawab, dan fungsi pemerintahan desa (Juardi et al, 2018; Hariguna et al, 2018). Dengan demikian akan dilakukan pendampingan dalam penyusunan RKPDes dan APBDes, mulai dari pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan hingga pelatihan penyusunan RKPDes dan APBDes. Selain itu, untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan RKPDes dan APBDes, maka akan diberikan poster kepada masyarakat desa yang berisi materi terkait partisipasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi untuk bergabung dan berpartisipasi (Merlinda et al, 2021). Ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Dalam membantu masyarakat Desa membantu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan membantu dalam pembuatan RKP dan APB Desa (Fatmala et al, 2023; Aprianto et al, 2018).

Terdapat beberapa tujuan dalam kegiatan pengabdian ini. Tujuan pertama adalah mewujudkan perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa (Andi, 2019). Tujuan selanjutnya adalah menumbuhkan dan mendorong peran masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, termasuk dokumen RKP Desa dan APB Desa (Lestari et al, 2021). Tujuan ketiga adalah mendidik dan melatih perangkat desa dan masyarakat desa dalam menyusun dan merancang dokumen RKP Desa dan APB Desa untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan (Rachmadi et al, 2021). Tujuan keempat adalah membantu penyusunan dokumen RKP dan APB Desa untuk tahun berikutnya (Sulismadi et al, 2017). Serta tujuan kelima sebagai wadah bagi mahasiswa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa dengan materi mata kuliah perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Utama et al, 2020; Rudiadi et al, 2021).

Metode

Pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui diskusi, sosialisasi, dan ceramah (Sudianing et al, 2022; Pratiwi et al, 2022). Kami melakukan evaluasi untuk melihat hasil pelaksanaan kegiatan. Bentuk pengukuran evaluasi yang

dilakukan berupa penyebaran kuesioner setelah kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan (Walean et al, 2021; Soleh et al, 2021).

Tahap pertama dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dengan metode ceramah. Peserta diberikan materi yang berisi ilmu dan arahan. Sehingga mereka dapat menyusun RKP Desa dan APB Desa, memahami pentingnya partisipasi dalam penyusunan dokumen RKP Desa dan APB Desa, serta diberi kesempatan untuk mencoba menyusun RKP Desa dan APB Desa (Setyaningsih, 2023). Tahap selanjutnya adalah penyampaian materi dengan metode sosialisasi. Peserta diberikan materi mengenai penyusunan RKP Desa dan APB Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setelah itu, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan terkait penyusunan RKP Desa dan rancangan APB Desa. Peserta diberikan materi pendampingan dan pelatihan penyusunan RKP Desa dan APB Desa pada sesi terakhir.

Evaluasi kegiatan ini dilakukan pada akhir kegiatan. Sebagai bahan evaluasi pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, kami mengadakan Post Test. Post-test yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta mengenai penyusunan RKPDes dan APBDes setelah materi penyuluhan disampaikan. Di akhir kegiatan, jawaban post-test kami jadikan sebagai bahan evaluasi kegiatan (Tiza et al, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Perangkat Desa Panaikang Kabupaten Sinjai menghadapi masalah karena tidak memahami pentingnya menyusun RKP dan APB Desa (Setyaningsih, 2019). Hal ini disebabkan karena masih kekurangan pengetahuan, kemampuan, dan kreativitas, terutama dalam hal menentukan prioritas program dan kegiatan desa serta perkiraan anggaran kegiatan yang akan dibiayai oleh APB Desa dan harus sesuai dengan penjabaran dari Desa RPJM. Realisasi pemecahan masalah pada kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan diskusi kelompok terfokus (Rahmah et al, 2021). Pada tahap awal kegiatan, tim pengabdian masyarakat memberikan penyuluhan kepada perangkat Desa, BPD, Karang Taruna, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya penyusunan dokumen RKPDes sesuai dengan penjabaran dalam dokumen RPJMDes dan mekanisme teknisnya. untuk merancang penyusunan dokumen RKPDes sesuai dengan Peraturan Nomor 20 Tahun 2021 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia agar perangkat desa mampu menyusun RKPDes periode berikutnya 1 (satu tahun) mendokumentasikan secara mandiri dan berpartisipasi aktif.

Simulasi FGD dan pembentukan tim ini digunakan untuk membuat rencana kerja tahunan pemerintahan desa. Tim ini terdiri dari pengawas yang dipilih oleh kepala desa, ketua yang dipilih secara musyawarah, sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim, anggota perangkat desa, anggota kader pemberdayaan masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya. Kemudian melakukan simulasi penelaahan kembali dokumen RPJMDes yang

dituangkan dalam format hasil penelaahan RPJMDes dengan memuat daftar usulan masyarakat desa yang diurutkan menurut tujuan SDG desa, daftar usulan kerja sama antardesa dan pihak ketiga, dan daftar prioritas usulan rencana program dan kegiatan pembangunan desa untuk tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Nomor 21 Tahun 2021 dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, simulasi FGD dan penyusunan RKPDes serta musrenbang desa dalam menyepakati RKPDes. Pelatihan dan pendampingan tim pengabdian mengenai simulasi penyusunan RKP Desa yang berpedoman pada dokumen RPJMDes yang berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; rencana kegiatan dan anggaran; prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh Desa; prioritas program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan rencana program, kegiatan, dan anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Setelah dokumen RKP Desa dibuat, dokumen APB Desa dibuat. Tim pengabdian memberikan penyuluhan kepada perangkat Desa, BPD, Karang Taruna, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya penyusunan dokumen APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 agar Desa aparaturnya mampu menyusun dokumen APBDes periode 1 (satu tahun) berikutnya secara transparan, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyusunan APBDes dilakukan oleh tim penyusun RAPBDes yang merupakan tim penyusun RKPDes sebelumnya. Tim pengabdian melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada peserta mengenai mekanisme penyusunan RAPBDes berdasarkan dokumen RKPDes yang berpedoman pada peraturan Bupati/Walikota. Kegiatan pendampingan penyusunan dokumen RAPBDes meliputi kegiatan yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Desa; Rancangan Peraturan Kepala Desa; Ringkasan APBDes; dan Penjelasan APBDes.

Tim kami melakukan pendampingan untuk simulasi mekanisme pelaksanaan Musyawarah dalam pembahasan dan persetujuan RAPBDes menjadi Peraturan Desa mengenai APBDes berikutnya. Pada tahap selanjutnya setelah penetapan APBDes, tim pengabdian akan melakukan pendampingan mengenai mekanisme teknis untuk penginputan penjabaran dokumen APBDes melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) kepada peserta layanan. Selanjutnya, hasil kesepakatan RAPBDes dimasukkan ke dalam berita acara hasil pembahasan BPD.

Setelah kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai, tim pengabdian kepada masyarakat Untuk menilai seberapa memahami peserta materi yang telah diberikan, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan penilaian pasca ujian kepada peserta dengan memberikan angket yang berisi pertanyaan tentang proses penyusunan RKPDes dan APBDes. Peserta pengabdian dipandu oleh tim dosen dan mahasiswa untuk mengisi

angket pemahaman materi dan angket evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan tujuan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan di kemudian hari.

Hasil evaluasi kuesioner menunjukkan bahwa 71,4 persen peserta kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai menjawab sangat setuju bahwa kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai agenda dan tepat waktu, sisanya sebesar 28,6 persen peserta memilih setuju. Hasil selanjutnya menunjukkan 73 persen peserta memberikan suara sangat setuju sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh narasumber cukup terkait dengan aktivitas yang dilakukan di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai. Sedangkan peserta yang memilih setuju sebanyak 17 persen dan 10 persen memilih netral atau ragu-ragu. Hasil jawaban selanjutnya diperoleh 78,6 persen peserta memilih jawaban sangat setuju dan 21,4 persen memilih setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes telah terlaksana secara efektif dan efisien.

Pada akhir kegiatan pengabdian, angket diberikan kepada peserta untuk menilai tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang telah disampaikan oleh narasumber pada saat kegiatan pengabdian dilaksanakan. Angket tingkat pemahaman peserta terdiri dari 2 (dua) jenis angket yaitu angket evaluasi tingkat pemahaman materi penyusunan RKPDes dan evaluasi tingkat pemahaman materi penyusunan APBDes. Hasil kuesioner dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 1. *Tingkat Pemahaman Materi Penyusunan APBDes*

No	Pertanyaan	Kode	(%)
1	Saya paham tentang dokumen RKP Desa	Q1	87.1
2	Saya memahami mekanisme pembentukan tim dalam penyusunan RKP Desa	Q2	87.1
3	Saya memahami pentingnya peran serta aparat Desa dan masyarakat dalam penyusunan dokumen RKP Desa	Q3	85.0
4	Saya memahami tahapan penyusunan RKPDes	Q4	88.6
5	Saya memahami struktur dalam penyusunan RKP Desa	Q5	86.4
6	Saya memahami penyusunan rencana kegiatan dan pembiayaan Desa dalam rancangan RKP Desa	Q6	87.1
7	Saya memahami mekanisme pengkajian ulang RPJMDes dalam penyusunan RKPDes	Q7	87.1
8	Saya memahami komponen-komponen dalam penyusunan Daftar Usulan RKPDes	Q8	85.7
9	Saya memahami siapa saja yang ikut serta dalam Musrenbang Desa dalam pembahasan rancangan RKPDes	Q9	87.1
10	Saya memahami mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa dalam pembahasan dan penetapan RKPDes	Q10	87.1
11	Saya memahami mekanisme penyelenggaraan Musrenbang Desa dalam penetapan RKPDes	Q11	88.6
12	Saya memahami mekanisme mengenai data dan informasi pembiayaan kegiatan pembangunan Desa dalam RKPDes	Q12	83.6

13	Saya memahami mekanisme penyusunan daftar prioritas usulan rencana program dan kegiatan pembangunan desa tahun anggaran berikutnya dalam RKPDes	Q13	85.0
14	Saya memahami mekanisme penyusunan daftar usulan masyarakat yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa dalam dokumen RKPDes	Q14	84.3
Rata-rata			86.4

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen RKPDes yang dilaksanakan di Desa Panaikang Kabupaten Sinjai melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh perangkat Desa, pengurus BUMDes, LPM, PKK, dan BPD sangat tanggap terhadap materi yang disampaikan. oleh narasumber. Berdasarkan tabel dibawah ini, setelah kegiatan pengabdian ini sebagian besar peserta lebih memahami mengenai penyusunan RKPDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020. Hal ini terlihat dari rata-rata persentase pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan menurut sumber sebesar 86,4 persen.

Tabel 2. Penyusunan RKPDes sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 21

No	Pertanyaan	Kode	(%)
1	Saya paham tentang dokumen APBDes	Q1	87.9
2	Saya memahami mekanisme pembentukan tim penyusunan dokumen APBDes	Q2	87.1
3	Saya memahami struktur dalam dokumen APBDes	Q3	88.6
4	Saya memahami komponen penerimaan dalam APBDes	Q4	87.1
5	Saya memahami komponen pengeluaran dalam APBDes	Q5	85.7
6	Saya memahami komponen pembiayaan dalam APBDes	Q6	87.9
7	Saya memahami tahapan dalam mempersiapkannya	Q7	87.1
8	APBDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Q8	86.4
9	Saya memahami persiapannya	Q9	84.3
10	Dokumen Raperdes dalam penyusunan RAPBDes	Q10	86.4
11	Saya memahami drafnya	Q11	83.6
12	Peraturan kepala desa dalam RAPBDes	Q12	84.3
Rata-rata			86.4

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, selain menyampaikan materi penyusunan RKPDes, juga memuat materi penyusunan APBDes hingga mekanisme input penjabaran dokumen APBDes di Keuangan Desa. Aplikasi Sistem (Siskeudes). Melalui Focus Group Discussion (FGD) para peserta yang mengikuti kegiatan ini menunjukkan respon yang aktif. Para peserta mampu menyimak dan menerima materi yang disampaikan pemateri dengan baik. berdasarkan tabel 4.5 diatas bahwa setelah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, peserta menjadi lebih mengetahui mekanisme penyusunan dokumen APBDes mulai dari tahapan penyusunan rancangan APBDes hingga penginputan terjemahan dokumen APBDes pada aplikasi Siskeudes. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pemahaman materi sebesar 86,4 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peserta FGD dan pelatihan serta asistensi perbaikan perencanaan pembangunan melalui asistensi penyusunan dokumen RKPDes dan APBDes cukup memahami informasi yang disampaikan oleh narasumber.

Kesimpulan

Hasil evaluasi tindakan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa 86,4 persen peserta memahami tujuan penyusunan RKPDes dan APBDes, pentingnya peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, tahapan penyusunan RKPDes dan APBDes, komponen dalam rancangan RKPDes dan APBDes, komponen dalam rancangan peraturan Desa dan rancangan peraturan kepala desa, mekanisme pengkajian RPJMDes, mekanisme penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dalam pembahasan dan persetujuan dokumen RKPDes dan APBDes, cara pengisian rencana program kegiatan dan pembiayaan, cara penyusunan penjabaran APBDes hingga teknis input penjabaran APBDes pada aplikasi Siskeudes. Hasil evaluasi yang dilakukan dengan metode angket menunjukkan bahwa 71,4% peserta menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dan disampaikan sesuai jadwal dan tepat waktu, 73% peserta mengatakan bahwa materi yang disampaikan narasumber cukup terkait dengan kegiatan, dan 78,6% peserta mengatakan bahwa kegiatan pelatihan dan pengabdian telah berjalan sangat efektif dan efisien.

Acknowledgment

-

References

- Abdillah, C., & Rahayu, P. Y. R. (2023). Media Pembelajaran Inovatif Berbasis Edutainment Untuk Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Sekolah Dasar. *Jurnal IPMAS*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.2.2023.305>
- Alam, A. Z. I., Alam, A. A. F., & Alimuddin, H. . (2023). Pendampingan Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Desa Tanarajae Untuk Mendukung Pengembangan Potensi Ekowisata. *Jurnal IPMAS*, 3(2), 104–112. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.2.2023.300>
- Aprianto, R., Wulandari, W., & Hafifah, N. (2018). Pengembangan aplikasi web mobile penjadwalan tugas aparatur desa untuk meningkatkan layanan masyarakat. *JTKSI (Jurnal Teknologi Komputer dan Sistem Informasi)*, 1(3), 81-86. <https://doi.org/10.56327/jtksi.v1i3.663>
- Erni, E., Supriadi, S., Usman, U., & Rusti, R. (2023). Training on the Use of the Independent Teaching Platform for Elementary School Teachers. *Jurnal IPMAS*, 3(2), 97–103. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.2.2023.299>
- Fatmala, V. R., Romadhan, A. A., & Sihidi, I. T. (2023). Analysis of the Village Government Work Plan Implementation (RKPDes) Fiscal Year 2022 Gonggang Village, Poncol Sub-District, Magetan Regency. *Jurnal Public Policy*, 9(2), 130-135. <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i2.6387>

- Hariguna, T., & Okviantari, A. (2018). Penentuan Prioritas Program Kerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa (studi pada desa jenetallasa kec. pallangga kab. gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(1). <https://doi.org/10.24252/jiap.v4i1.5159>
- Lestari, SM, & Wahyuningsih, YE (2021). Community Participation in Compilation of Village Government Work Plans (RKPDES). *Journal of Social Science*, 3,453–458. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/235>
- Merlinda, S., Yusida, E., Hasyim, M., Abbas, I., & Sumanto, A. (2021). Village Government Work Plan Preparation Training (RKPDes). *Journal of Community Service*, 3(June), 453–458. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.699>
- Mustamin, M., & Nur, M. A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai Melalui Pengembangan Ekowisata Pulau Larea Rea (Edukasi Ecoprinting, Outbound Education, dan Digital Marketing). *Jurnal IPMAS*, 3(2), 113–123. <https://doi.org/10.54065/ipmas.3.2.2023.296>
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239. <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480>
- Novianty, I., Setiawan, I., Triuspitorini, F. A., Syarief, M. E., & Gunawan, A. (2021). Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dalam Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Desa Sariwangi. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 12(4), 715-722. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v12i4.7053>
- Pratiwi, N. M. I., Mulyati, D. J., & Andayani, S. (2022, August). Penyuluhan Dan Pendampingan Peningkatan Kualitas Administrasi Desa (Bidang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk). In *PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 191-197). <https://doi.org/10.30996/scfp.v1i1.738>
- Rachmadi, T., Rahayu, T. P., Waluyo, A., & Yuliyanto, W. (2021). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Bidang Kesehatan di Desa Rantewringin, Buluspesantren, Kebumen. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3), 578-589. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.760>
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Preparation of Village Regulations on Community Participation-Based Village Revenue and Expenditure Budget in Cileles Village, Jatinangor, Sumedang, West Java. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>

- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45-60. <http://dx.doi.org/10.47313/pjsh.v6i1.1036>
- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Al Sukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal El-Riyasah*, 12(1), 44-58. <http://dx.doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>
- Setyaningsih, D. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan prioritas rkpdes (Rencana Kerjapembangunan Desa) Menggunakan metode Simple Additive Weighting (Saw) Studi Kasus: Desa Rambah Baru (Doctoral Dissertation, Universitas Pasir Pengaraian).
- Setyaningsih, G. (2023). Pelatihan Aplikasi Penentuan Prioritas Rencana Kerja Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat (JPMM)*, 5(1), 23-35. <http://dx.doi.org/10.35671/jpmm.v5i1.2168>
- Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). Village Financial Management. Focusmedia.
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2), 100-115. <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Sulismadi, S., Wahyudi, W., & Muslimin, M. (2017). Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. *ARISTO*, 5(2), 216–258. <https://doi.org/10.24269/ARS.V5I2.487>
- Syapsan, S., Taryono, T., Sari, L., Isbah, U., & Mayes, A. (2023). Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kabupaten Kampar. *ABDIMASISEI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-39. <https://doi.org/10.46750/abdimasisei.v1i1.157>
- Tiza, A. L., & Taus, W. (2019). Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Di Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. *Sabdamas*, 1 (1), 271-277.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas dalam pengurangan risiko bencana. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 598-606. <http://dx.doi.org/10.31604/jips.v7i3.2020.598-606>
- Walean, T., Mantiri, MS, & Pati, AB (2021). Community Participation in Compilation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Sinisir Village, Modinding District, South Minahasa Regency. *Journal of Governance*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32832/jurma.v6i2.1600>